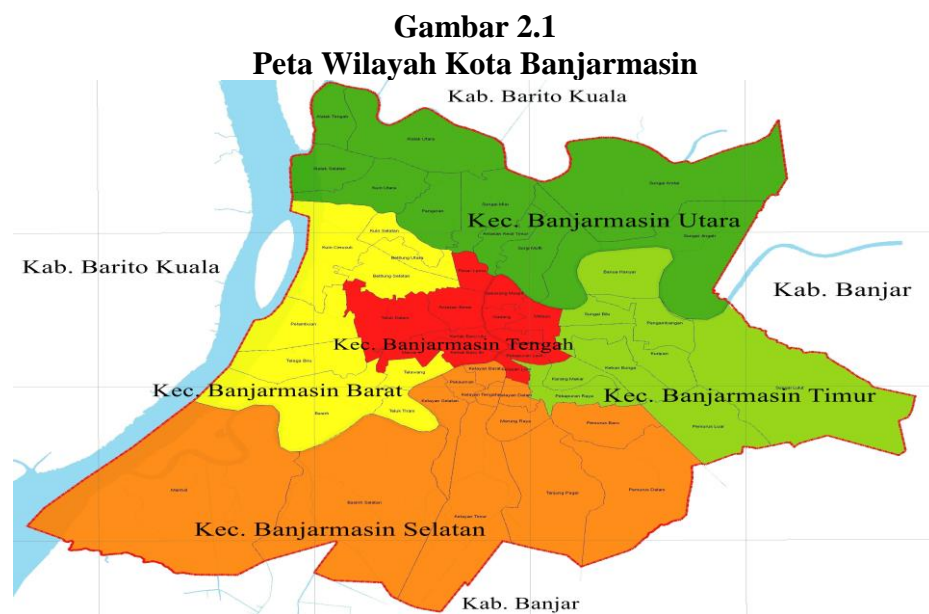


BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3°16'46'' sampai dengan 3°22'54'' lintang selatan dan 114°31'40'' sampai dengan 114°39'55'' bujur timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0.16 m di bawah permukaan laut. Kota Banjarmasin terletak di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur Kabupaten Banjar, sebelah barat Kabupaten Barito Kuala, dan sebelah selatan Kabupaten Banjar.



Sumber: Diolah dari data (<http://ppsp.nawasis.info/>, diakses 03 November 2016)

Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98.46 Km² atau 0.26 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin dan pembentukan Kecamatan Banjarmasin Tengah, kemudian dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2001

tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin, secara administratif Kota Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas dengan persentase sebesar 38.87 persen (38.27 Km²) sementara Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit dengan persentase sebesar 6.76 persen (6.66 Km²).

Tabel 2.1
Luas daerah menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin tahun 2015

Kecamatan	Luas	Persentase
	(Km ²)	(%)
Banjarmasin Selatan	38.27	38.87
Banjarmasin Timur	23.86	24.23
Banjarmasin Barat	13.13	13.34
Banjarmasin Tengah	6.66	6.76
Banjarmasin Utara	16.54	16.80
Kota Banjarmasin	98.46	100.00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin dalam BPS Tahun 2016.

Pada tahun 2015 jumlah Kelurahan di Kota Banjarmasin sebanyak 52 Kelurahan yang terbagi menjadi 117 Rukun Warga (RW) dan 1.568 Rukun Tetangga (RT).

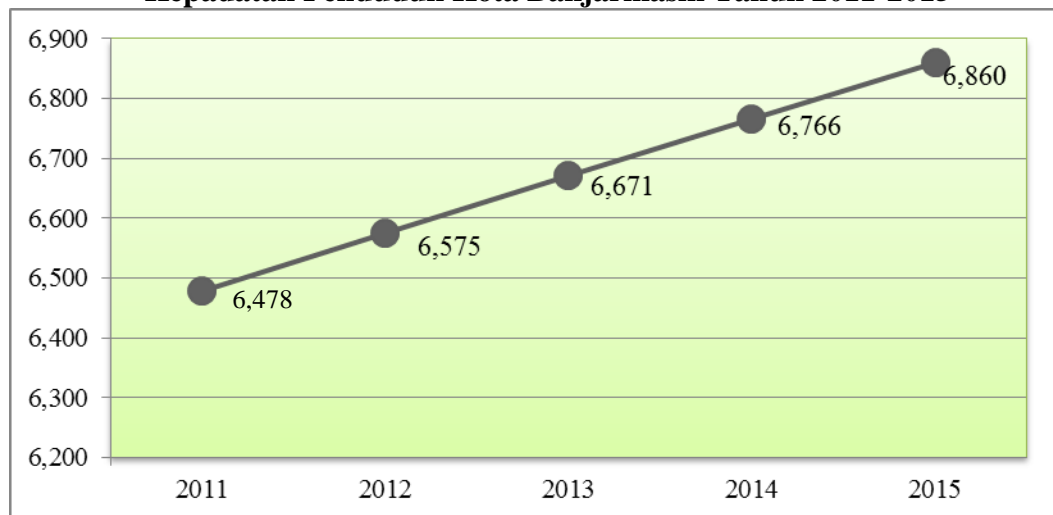
Tabel 2.2
Nama Ibukota Kecamatan dan jumlah Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga per Kecamatan di Kota Banjarmasin tahun 2015

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
Banjarmasin Selatan	Kelayan Selatan	12	26	341
Banjarmasin Timur	Kuripan	9	17	280
Banjarmasin Barat	Pelambuan	9	25	358
Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	12	26	257
Banjarmasin Utara	Alalak Utara	10	23	332
Kota Banjarmasin	-	52	117	1.568

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dalam BPS Tahun 2016.

Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin dengan luas wilayah sebesar 98,46 Km² mencapai 6.860 penduduk/ Km². Dari angka tersebut, penduduk Kota Banjarmasin merupakan yang terpadat jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari tahun ke tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin selalu mengalami peningkatan hal ini sejalan dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 2.2
Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015



Sumber: Diolah dari data BPS Kota Banjarmasin

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan, Tahun 2015

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Banjarmasin Selatan	79.528	78.150	157.678	101,76
Banjarmasin Timur	59.846	60.216	120.062	99,39
Banjarmasin Barat	75.952	73.780	149.732	102,94
Banjarmasin Tengah	46.708	48.042	94.750	97,22
Banjarmasin Utara	76.099	77.119	153.218	98,68
Jumlah	338.133	337.307	675.440	100,24

Sumber: BPS Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.3 terlihat jelas bahwa pada tahun 2015 rasio jenis kelamin di Kota Banjarmasin sebesar 100,24. Hal ini dapat menggambarkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan selisih cenderung kecil. Tingkat kepadatan penduduk terbesar ada pada Kecamatan Banjarmasin Selatan yang mencapai 157.678 jiwa/Km².

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin

1. Profil DPRD Kota Banjarmasin Secara Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilu, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum (pemilu). Dasar hukum dan kedudukan DPRD Kota Banjarmasin masa jabatan tahun 2014-2019 tidak terpisahkan dengan beberapa dasar dan landasan konstitusional yang berlaku hingga terbentuk dan terwadahi didalam lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Pada tanggal 08 September 2014, berdasarkan hasil pemilu 2014 dan Keputusan Gubernur Kalsel nomor 188.44/0470/kum/2014 tanggal 04 September 2014 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin masa jabatan 2014-2019.

Anggota dewan periode 2014-2019 berjumlah 45 orang, berasal dari 11 partai politik peserta pemilu yang berasal dari 5 daerah pemilihan. Masing-masing partai politik memperoleh jumlah kursi yang berbeda, antara lain:

Tabel 2.4
Jumlah Perolehan Kursi Berdasarkan Partai

No	Partai	Jumlah Kursi	%
1.	Partai Golongan Karya (Golkar)	8 kursi	17.8 %
2.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6 kursi	13.3 %
3.	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	5 kursi	11.1 %
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5 kursi	11.1 %
5.	Partai Demokrat	5 kursi	11.1 %
6.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4 kursi	8.9 %
7.	Partai Keadilan Sosial (PKS)	4 kursi	8.9 %
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3 kursi	6.7 %
9.	Partai Hati Nurani (Hanura)	3 kursi	6.7 %
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1 kursi	2.2 %
11.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1 kursi	2.2 %
Jumlah		45 kursi	100 %

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa perolehan kursi di DPRD Kota Banjarmasin dilihat berdasarkan partai, jumlah terbanyak yaitu dari partai Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan 8 kursi atau 17.8 persen. Sedangkan perolehan kursi yang paling rendah yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang hanya memperoleh 1 kursi saja atau 2.2 persen.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, sesuai ketentuan regulasi yang berlaku dan berbagai isu strategis yang dihadapi, maka dirumuskan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

- 1) Visi adalah ungkapan dan cita-cita tentang keadaan atau keberhasilan tertentu yang ingin diwujudkan di masa depan. Visi Sekretariat DPRD

Kota Banjarmasin adalah: “Terwujudnya sistem pendukung DPRD Kota Banjarmasin yang handal, efektif, efisien, dan akuntabel”.

- 2) Misi merupakan upaya menjabarkan dan mengaktualisasikan visi menjadi nyata, lebih fokus dan terarah dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi kebijakan peraturan perundangan-undangan, tanggungjawab pokok dan kelembagaan DPRD Kota Banjarmasin yang berlangsung selama ini.

Adapun operasionalisasi visi Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin dirumuskan dalam misi Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin sebagai berikut:

- a. Misi pertama: mewujudkan sistem pendukung DPRD yang handal, efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. Misi kedua: mewujudkan kelancaran fasilitasi, penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD secara efisien dan efektif;
- c. Misi ketiga: mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang akuntabel, dan tepat waktu;
- d. Misi keempat: mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD yang transparan dan efektif;
- e. Misi kelima: meningkatkan pengetahuan, profesionalisme dan integritas untuk peningkatan kinerja.

Visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin pada hakekatnya memberikan arah dukungan kepada lembaga DPRD dalam perwujudan optimalisasi kinerja anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu untuk mencapai misi tersebut, maka renstra Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin diarahkan pada pencapaian tugas pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pendukung DPRD yang handal, efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tujuan:
 - a) Terwujudnya sistem administrasi dan manajemen kesekretariatan yang profesional;
 - b) Tercapainya tata kelola kesekretariatan dan tata kelola kelembagaan DPRD yang baik dan terpercaya;
 - c) Tercapainya kinerja sekretariat DPRD dan kinerja kelembagaan DPRD yang optimal dalam pelaksanaan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjarmasin.
2. Mewujudkan kelancaran fasilitasi penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD secara efisien dan efektif, dengan tujuan:
 - a) Terwujudnya kelancaran fasilitasi fungsi legislasi DPRD Kota Banjarmasin bersama Kepala Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;
 - b) Terbangunnya kapasitas kelembagaan DPRD Kota Banjarmasin melalui fasilitasi Sekretariat DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah inisiatif DPRD;
 - c) Tercapainya kapasitas kelembagaan DPRD Kota Banjarmasin yang kredibel melalui fasilitasi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.
3. Mewujudkan kelancaran fasilitasi fungsi anggaran DPRD Kota Banjarmasin yang akuntabel, tepat waktu, dengan tujuan:

- a) Terwujudnya kelancaran pembahasan dan penetapan RAPBD sesuai politik anggaran yang akuntabel;
 - b) Terbangunnya kapasitas kelembagaan DPRD Kota Banjarmasin melalui fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin dalam penetapan RAPBD tepat waktu;
 - c) Tercapainya tata kelola DPRD Kota Banjarmasin yang baik dan terpercaya melalui fasilitasi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran.
4. Mewujudkan kelancaran fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan, dengan tujuan:
- a) Terwujudnya kelancaran fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan sistem pengawasan DPRD untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 - b) Tercapainya kelancaran fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja pengawasan DPRD yang efektif dan akuntabel;
 - c) Tercapainya kelancaran fasilitasi Sekretariat DPRD dalam rangka mewujudkan tata kelola DPRD Kota Banjarmasin yang terpercaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

3. Fraksi-Fraksi

Fraksi merupakan alat kelengkapan DPRD, berupa pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan ketentuan, sekurang-kurangnya empat orang anggota DPRD untuk tiap fraksi. Partai politik yang tidak cukup membentuk satu fraksi dapat bergabung

dengan partai politik untuk membentuk satu fraksi. Setiap anggota DPRD wajib terhimpun dalam fraksi-fraksi. Setiap Fraksi berhak:

- 1) Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksinya masing-masing;
- 2) Mendapat bantuan sarana dan prasarana administratif dari Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Memiliki tanggung jawab untuk mmberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD dan mengadakan koordinasi dalam hal-hal yang berkenaan dengan bidang tugas DPRD maupun hal-hal yang dianggap perlu.

Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Banjarmasin berjumlah 7 fraksi murni dan 2 fraksi gabungan, adapun fraksi tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Banjarmasin

No	Fraksi	Kursi	%
1.	Fraksi Golongan Karya (Golkar)	8 kursi	17.8 %
2.	Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB)	6 kursi	13.3 %
3.	Fraksi Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P)	5 kursi	11.1 %
4.	Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP)	5 kursi	11.1 %
5.	Fraksi Demokrat	5 kursi	11.1 %
6.	Fraksi Amanat Nasional (PAN)	4 kursi	8.9 %
7.	Fraksi Keadilan Sosial (PKS)	4 kursi	8.9 %
8.	Fraksi Gerindra Bulan Bintang	4 kursi	8.9 %
9.	Fraksi Hannas (Hanura, Nasdem)	4 kursi	8.9 %
Jumlah		45 kursi	100%

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa dari jumlah perolehan kursi dapat mempengaruhi jumlah anggota fraksi. Dilihat dari tabel 2.4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani (Hanura) hanya memperoleh 3 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Nasional Demokrat

(Nasdem) hanya memperoleh 1 kursi sehingga terjadi penggabungan dalam Fraksi, antara lain: Fraksi Fraksi Gerindra Bulan Bintang, dan Fraksi Hannas (Hanura, Nasdem) dengan masing-masing fraksi berjumlah 4 kursi.

4. Komisi-Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Tidak hanya fraksi-fraksi, komisi juga wajib diikuti oleh anggota DPRD dimana penempatan anggota komisi diusulkan oleh setiap fraksi. Adapun komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Banjarmasin berjumlah 4 (empat) komisi terdiri dari:

1. Komisi I (satu) membidangi Pemerintahan, meliputi bidang hukum dan perundang-undangan, aparatur, ormas, sosial politik, ketertiban, kependudukan, penerangan, dan pers serta pertahanan.
2. Komisi II (dua) membidangi ekonomi dan keuangan, meliputi bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pangan, koperasi, pariwisata, BUMD, dunia usaha dan penanaman modal.
3. Komisi III (tiga) membidangi pembangunan, meliputi bidang pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan, rakyat dan lingkungan hidup.
4. Komisi IV (empat) membidangi kesejahteraan rakyat, meliputi bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, iptek, kepemudaan dan olahraga, agama, budaya, sosial, peranan wanita, transmigrasi dan keluarga berencana (KB).

Tugas komisi melakukan pembahasan anggaran tiap SKPD terkait pembahasan Raperda, pengawasan pelaksanaan pemerintahan, penyelesaian sengketa yang disampaikan Pemkot atau masyarakat, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melakukan kunjungan kerja sesuai dengan persetujuan pimpinan DPRD, mengadakan rapat kerja dengar pendapat, mengajukan usul sesuai dengan tugas komisinya serta memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD.

4.1 Komisi I DPRD Kota Banjarmasin

Tabel 2.6
Struktur Komisi I DPRD Kota Banjarmasin

No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
1.	Muhammad Natsir	L	Ketua
2.	H.M. Yamin. HR.S.Far.Apt.MM	L	Wakil Ketua
3.	H. Asmad, S.Pt	L	Sekretaris
4.	Noorlatifah, SE	P	Anggota
5.	Elly Rahmah, SE	P	Anggota
6.	Abdurrasyid Ridha, SE	L	Anggota
7.	Bambang Yanto. P,SE	L	Anggota
8.	Noval	L	Anggota
9.	Mathari, S.Ag	L	Anggota

*Keterangan: L: Laki-laki, P: Perempuan

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.6 mengenai struktur Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa jumlah anggota Komisi I berjumlah 9 orang terdiri dari antara lain: 7 anggota dewan laki-laki, dan 2 anggota dewan perempuan. Dilihat dari jumlah tersebut, dapat diketahui bahwa keterwakilan anggota dewan perempuan belum mencapai 30 persen.

Hubungan Kerja Komisi I DPRD Kota Banjarmasin:

1. Kodim 1007 Banjarmasin
2. Poltabes Banjarmasin

3. Kejaksaan Negeri Banjarmasin
4. Pengadilan Negeri Banjarmasin
5. Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
6. Kantor Statistik Banjarmasin
7. Kantor Lembaga Kemasyarakatan
8. Kantor Imigrasi
9. Balai Bispa Kelas I
10. Pengelolaan Utang Piutang Negara
11. TVRI/ RRI Nusantara III Banjarmasin
12. Organisasi, Lembaga/ Badan yang bergerak dibidang Penerangan,
Kemasyarakatan dan Hukum, Sosial, Politik/ Parpol.

Mitra Kerja Komisi I DPRD Kota Banjarmasin:

1. Asisten Pemerintahan
2. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Dispencahil
5. Inspektorat
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Bagian Tata Pemerintahan
8. Bagian Hukum
9. Bagian Organisasi
10. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
11. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi
12. Badan Narkotika Kota Banjarmasin

4.2 Komisi II DPRD Kota Banjarmasin

Tabel 2.7
Struktur Komisi II DPRD Kota Banjarmasin

No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
1.	Andi Effendi, SPd.MM	L	Ketua
2.	H.M Faisal Hariyadi, SE	L	Wakil Ketua
3.	H.M Ismail Iberahim, SE	L	Sekretaris
4.	Abdul Gais, SE, MM	L	Anggota
5.	dr. Aulia Ramadhan Supit	L	Anggota
6.	Awan Subarkah, S.TP	L	Anggota
7.	Agus Suprpto, S.Pd	L	Anggota
8.	H.A. Rudiani, SE	L	Anggota
9.	Tugiatno, S.Sos	L	Anggota
10.	dr. Hj. Ananda, M.Kes	P	Anggota
11.	Sri Nurnaningsih, SE	P	Anggota
12.	Drs. Johansyah	L	Anggota
13.	Drs. Syahrani. MT	L	Anggota

*Keterangan: L: Laki-laki, P: Perempuan

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.7 mengenai struktur Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa jumlah Komisi II yaitu sebanyak 13 orang terdiri dari antara lain: 11 anggota dewan laki-laki, dan 2 anggota dewan perempuan. Dilihat dari jumlah tersebut, dapat diketahui bahwa keterwakilan anggota dewan perempuan belum mencapai 30 persen.

Hubungan Kerja Komisi II DPRD Kota Banjarmasin:

1. Perum Pegadaian
2. Bolog Banjarmasin
3. PN Garam Banjarmasin
4. Kesatuan Pemangku Hasil Hutan
5. Kantor Pelayanan PBB
6. Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin

7. Kantor Pengawas Pajak
8. Kantor Bea Cukai
9. Perum Listrik Negara Cabang Banjarmasin
10. Bank Pemerintah/ Swasta

Mitra Kerja Komisi II DPRD Kota Banjarmasin:

1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
3. Disperindag
4. Dinas Koperasi, UMKM
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
6. Dinas Pengelolaan Pasar
7. Bagian Perekonomian
8. Asisten Administrasi
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10. Bagian Umum
11. Bagian Humas
12. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
13. PDAM Banjarmasin
14. Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah

4.3 Komisi III DPRD Kota Banjarmasin

Tabel 2.8
Struktur Komisi III DPRD Kota Banjarmasin

No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
1.	Aman Fahriansyah	L	Ketua
2.	Totok Hariyanto, S.Pd	L	Wakil Ketua
3.	Mushaffa Zakir, Lc	L	Sekretaris

Lanjutan

No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
4.	Zainal Hakim, ST	L	Anggota
5.	H. Zainal.A.Husni	L	Anggota
6.	Taufik Husin, S.Sos	L	Anggota
7.	Matnor Ali.F,SE	L	Anggota
8.	H.Abdul Muis	L	Anggota
9.	Mursyid,S.Pd	L	Anggota
10.	Muhammad Isnaini, SE	L	Anggota

*Keterangan: L: Laki-laki, P: Perempuan

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.8 mengenai struktur Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa jumlah Komisi III yaitu sebanyak 10 orang yang secara keseluruhan merupakan anggota dewan laki-laki, dengan kata lain tidak ada anggota dewan perempuan.

Hubungan Kerja Komisi III DPRD Kota Banjarmasin:

1. Kantor Daerah Telkom
2. Kantor Pos dan Giro
3. Administrasi Tata Pelabuhan
4. Perum Perumnas Banjarmasin
5. Kelompok Pecinta Alam/ Sumber Daya Alam
6. Organisasi/ Badan/ Lembaga/ Asosiasi/ Himpunan/ Gabungan Pengusaha yang bergerak dibidang pembangunan, perindustrian, pengangkutan, perhubungan dan energi termasuk SFC cabang Banjarmasin

Mitra Kerja Komisi III DPRD Kota Banjarmasin:

1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Lingkungan Hidup

4. Dinas Bina Marga
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Tata Ruang, Cipta Karya, dan Perumahan
7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
8. Dinas Sumber Daya Air Sungai dan Drainase
9. Bagian Pengendalian Pembangunan

4.4 Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin

Tabel 2.9
Struktur Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin

No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
1.	Darma Sri Handayani	P	Ketua
2.	M.Suriani, SE	L	Wakil Ketua
3.	Hairun Nisa, SE	P	Sekretaris
4.	Suyato, SE,.MM	L	Anggota
5.	Hj. Jumiati, SH	P	Anggota
6.	H. Deddy Sophian, SE	L	Anggota
7.	Mu'adz, S.Ag	L	Anggota
8.	Aliansyah	L	Anggota
9.	Hj. Siti Rahimah	P	Anggota

*Keterangan: L: Laki-laki, P: Perempuan

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.9 mengenai struktur Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa jumlah Komisi IV yaitu sebanyak 9 orang terdiri dari antara lain: 5 anggota dewan laki-laki, dan 4 anggota dewan perempuan. Yang menjadi perhatian adalah didalam komisi IV DPRD Kota Banjarmasin yaitu diketuai oleh seorang anggota dewan perempuan. Hal itu menjadi bentuk apresiasi untuk kaum perempuan.

Hubungan Kerja Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin:

1. Kantor Agama Kota
2. Pengadilan Agama

3. BKKBN
4. Asuransi Pemerintah/ Swasta
5. Organisasi/ Badan/ Lembaga yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan/ keagamaan/ kewanitaan/ pemuda/ olahraga/ kebudayaan dan LSM

Mitra Kerja Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat
6. Tim Penggerak PKK Kota
7. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

5. Badan Kehormatan (BK)

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Badan Kehormatan bertugas menjaga kredibilitas dan citra dewan, dengan jalan menjaga dewan dari pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik maupun peraturan tata tertib dewan. Badan kehormatan juga memiliki tugas menjaga disiplin, etika, dan moral anggota dewan, meneliti dugaan pelanggaran, melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan, menyampaikan hasil keputusan hingga menyampaikan hasil rekomendasi berupa pemberhentian atau rehabilitasi nama jika pelanggaran tidak terbukti.

Tabel 2.10
Struktur Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin

No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
1.	H. Iwan Rusmali, SH, MM	L	Koordinator
2.	H. Budi Wijaya, SE	L	Wakil Koordinator
3.	Suprayogi, S.Sos	L	Wakil Koordinator
4.	Arufah, SE, MM	L	Wakil Koordinator
5.	Abdul Gais, SE, MM	L	Ketua
6.	dr. Aulia Ramadhan Supit	L	Wakil Ketua
7.	Tugiatno, S.Sos	L	Anggota
8.	Drs. Johansyah	L	Anggota
9.	Elly Rahmah, SE	P	Anggota
10.	H. Fathurrahim, SH, MH	L	Sekretaris dan Bukan Anggota

*Keterangan: L: Laki-laki, P: Perempuan

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.10 mengenai struktur Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa jumlah Badan Kehormatan (BK) yaitu sebanyak 10 orang terdiri dari antara lain: 8 anggota dewan laki-laki, dan 1 anggota dewan perempuan serta 1 sekretaris yang bukan merupakan anggota.

6. Badan Musyawarah (Banmus)

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan musyawarah bertugas memberikan pertimbangan terhadap program kerja dewan, menetapkan kegiatan dan jadwal acara dewan, memutuskan materi rapat dan merekomendasikan pembentukan panitia khusus (Pansus). Pansus merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh pimpinan dewan setelah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah. Keanggotaan Badan Musyawarah diusulkan oleh tiap fraksi sebanyak-banyaknya tidak melebihi dari setengah anggota dewan.

Tabel 2.11
Struktur Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Banjarmasin

No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
1.	H. Iwan Rusmali, SH, MM	L	Koordinator
2.	H. Budi Wijaya, SE	L	Wakil Koordinator
3.	Suprayogi, S.Sos	L	Wakil Koordinator
4.	Arufah, SE, MM	L	Wakil Koordinator
5.	Matnor Ali, F, SE	L	Anggota
6.	Noorlatifah, SE	P	Anggota
7.	H. Asmad, SPt	L	Anggota
8.	Zainal A. Husni	L	Anggota
9.	Taufik Husin, S.Sos	L	Anggota
10.	Muhammad Natsir	L	Anggota
11.	Hj. Jumiati, SH	P	Anggota
12.	Abdurrasyid Ridha, SE	L	Anggota
13.	Hairun Nisa, SE	P	Anggota
14.	Sri Nurnaningsih, SE	P	Anggota
15.	H. Abdul Muis	L	Anggota
16.	Muhammad Suriani	L	Anggota
17.	Mathari, S.Ag	L	Anggota
18.	Aliansyah	L	Anggota
19.	Muhammad Isnaini	L	Anggota
20.	Hj. Siti Rahimah, SE	P	Anggota
21.	Mu'adz	L	Anggota
22.	M. Syahrani	L	Anggota
23.	H. Fathurrahim, SH, MH	L	Sekretaris dan Bukan Anggota

*Keterangan: L: Laki-laki, P: Perempuan

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.11 mengenai struktur Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa jumlah Badan Musyawarah (Banmus) yaitu sebanyak 23 orang terdiri dari antara lain: 17 anggota dewan laki-laki, dan 5 anggota dewan perempuan serta 1 sekretaris yang bukan merupakan anggota.

7. Badan Anggaran (Bangang)

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam pembuatan APBD serta memberikan hasil perhitungan APBD yang dibuat oleh Kepala Daerah kepada dewan. Badan Anggaran juga bertugas menyusun anggaran DPRD dengan memberikan saran terhadap penyusunan belanja kepada kesekretariatan dewan. Selain itu, melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan pelaporan anggaran yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

Tabel 2.12
Struktur Badan Anggaran (Bangang) DPRD Kota Banjarmasin

No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
1.	H. Iwan Rusmali, SH, MM	L	Koordinator
2.	H. Budi Wijaya, SE	L	Wakil Koordinator
3.	Suprayogi, S.Sos	L	Wakil Koordinator
4.	Arufah, SE, MM	L	Wakil Koordinator
5.	Matnor Ali, F, SE	L	Anggota
6.	Noorlatifah, SE	P	Anggota
7.	Andi Effendi, S.Pd, MM	L	Anggota
8.	H. Deddy Sophian, SE	L	Anggota
9.	Muhammad Natsir	L	Anggota
10.	Tugiatno, S.Sos	L	Anggota
11.	Aman Fahriansyah	L	Anggota
12.	Abdurrasyid Ridha, SE	L	Anggota
13.	Abdul Gais, SE, MM	L	Anggota
14.	Bambang Yanto Permono, SE	L	Anggota
15.	Mathari, S.Ag	L	Anggota
16.	Mushaffa Zakir, Lc	L	Anggota
17.	H. M. Faisal Hariyadi, SE	L	Anggota

Lanjutan			
No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
18.	H. Abdul Muis	L	Anggota
19.	Mu'adz	L	Anggota
20.	Mursyid, S.Pd	L	Anggota
21.	Muhammad Isnaini, SE	L	Anggota
22.	H.M Ismail Ibrahim, SE	L	Anggota
23.	H. Fathurrahim, SH, MH	L	Sekretaris dan Bukan Anggota

*Keterangan: L: Laki-laki, P: Perempuan

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.12 mengenai struktur Badan Anggaran (Bangang) DPRD Kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa jumlah Badan Anggaran (Bangang) yaitu sebanyak 23 orang terdiri dari antara lain: 21 anggota dewan laki-laki, dan 1 anggota dewan perempuan serta 1 sekretaris yang bukan merupakan anggota.

8. Badan Legislasi (Banleg)

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Badan Legislasi bertugas menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

Tabel 2.13
Struktur Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Banjarmasin

No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
1.	H. Iwan Rusmali, SH, MM	L	Koordinator
2.	H. Budi Wijaya, SE	L	Wakil Koordinator
3.	Suprayogi, S.Sos	L	Wakil Koordinator
4.	Arufah, SE, MM	L	Wakil Koordinator
5.	Noval	L	Anggota

Lanjutan			
No	Nama	Jenis Kelamin*)	Jabatan
6.	Agus Suprpto, S.Pd	L	Anggota
7.	H. A. Rudiani, SE	L	Anggota
8.	Dr. Ananda, M.Kes	P	Anggota
9.	Zainal A. Husni	L	Anggota
10.	Zainal Hakim, ST	L	Anggota
11.	Taufik Husin, S.Sos	L	Anggota
12.	Hj. Jumiati, SH	P	Anggota
13.	Bambang Yanto Permono, SE	L	Anggota
14.	Totok Hariyanto, SPd	L	Anggota
15.	H. M. Faisal Hariyadi, SE	L	Anggota
16.	H. M. Yamin, HR, S.Far.Apt,MM	L	Anggota
17.	Awan Subarkah, STP	L	Anggota
18.	H.Fathurrahim, SH, MH	L	Sekretaris dan Bukan Anggota

*Keterangan: L: Laki-laki, P: Perempuan

Sumber: Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.13 mengenai struktur Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Banjarmasin, dapat diketahui bahwa jumlah Badan Legislasi (Banleg) yaitu sebanyak 18 orang terdiri dari antara lain: 15 anggota dewan laki-laki, dan 2 anggota dewan perempuan serta 1 sekretaris yang bukan merupakan anggota.

9. Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses)

Setiap tahun anggaran telah diprogramkan pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat atau biasa disebut reses oleh anggota DPRD. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh setiap anggota dewan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir Undang-Undang diubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Reses dilakukan oleh setiap anggota dewan pertahunnya sebanyak dua sampai tiga kali, tergantung keputusan bersama DPRD. Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi

kontituen sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada kontituen oleh setiap anggota dewan sesuai Dapil masing-masing. Hasil reses nantinya akan disampaikan oleh anggota dewan kepada Pemerintah Daerah agar segera direalisasikan dengan catatan skala prioritas.

C. Profil Anggota DPRD Kota Banjarmasin Periode 2014-2019

Anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 2014-2019 berjumlah 45 orang, antara lain 8 anggota perempuan dan 37 anggota laki-laki. Masing-masing anggota memiliki latar belakang pendidikan, usia, dan agama yang berbeda-beda, untuk lebih jelasnya bisa dilihat ditabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Jumlah Anggota DPRD Kota Banjarmasin Periode 2014-2019
Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Perempuan	%	Laki-laki	%	Jumlah	%
< SMA	-	0 %	-	0 %	-	0 %
SMA	2	4.4 %	7	15.6 %	9	20 %
D1-D3	-	0 %	-	0 %	-	0 %
S1	5	11.1 %	25	55.5 %	30	66.6 %
S2	1	2.3 %	5	11.1 %	6	13.4 %
Jumlah	8	17.8 %	37	82.2 %	45	100 %

Sumber: diolah dari data Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 2.14 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Banjarmasin cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya persentase jumlah anggota DPRD dengan pendidikan terakhir S1 sebesar 66.6 persen. Selain itu, dilihat dari latar belakang pendidikan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin saat ini mayoritas dari mereka adalah berpendidikan S1, yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 11.1 persen, dan 1 orang berpendidikan pasca-sarjana (S2) atau sebesar 2.3 persen, sementara sisanya adalah mereka dengan pendidikan SMA yaitu sebanyak 2 orang atau 4.4 persen.

Tabel 2.15
Anggota DPRD Kota Banjarmasin Periode 2014-2019 Berdasarkan Usia

Usia	Perempuan	%	Laki-laki	%	Jumlah	%
20 - 30 tahun	2	4.4 %	-	0 %	2	4.4 %
31 - 40 tahun	2	4.4 %	8	17.8 %	10	22.2 %
41 - 50 tahun	4	9 %	20	44.4 %	24	53.4 %
51 - 60 tahun	-	0 %	8	17.8 %	8	17.8 %
61 - 70 tahun	-	0 %	1	2.2 %	1	2.2 %
Jumlah	8	17.8 %	37	82.2 %	45	100 %

Sumber: diolah dari data Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Dalam hal usia, berdasarkan tabel 2.15 dapat diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Kota Banjarmasin mayoritas berusia pada rentang 41-50 tahun yaitu sebanyak 24 orang (53.4 persen), sementara terbanyak kedua adalah pada rentang 31-40 tahun yaitu sejumlah 10 orang (22.2 persen), rentang usia 51-60 tahun sebanyak 8 orang (17.8 persen), rentang usia 20-30 tahun sebanyak 2 orang (4.4 persen), kemudian rentang usia 61-70 tahun berada pada urutan terakhir yaitu hanya ada 1 orang (2.2 persen).

Tabel 2.16
Anggota DPRD Kota Banjarmasin Periode 2014-2019 Berdasarkan Agama

Jenis Kelamin	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Kong Hu Cu
Perempuan	8	-	-	-	-	-
Laki-Laki	36	-	-	-	1	-
Jumlah	44	-	-	-	1	-
%	97.8 %	0 %	0 %	0 %	2.2 %	0 %

Sumber: diolah dari data Perpustakaan DPRD Kota Banjarmasin

Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Banjarmasin, mayoritas penduduk Kota Banjarmasin beragama Islam dengan jumlah sebesar 791.919 jiwa, sehingga juga berdampak pada jumlah anggota DPRD yang didominasi beragama Islam, hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.16 anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 2014-2019 bermayoritas memeluk agama Islam dengan

persentase 97.8 persen (44 orang), dan 2.2 persen memeluk agama Budha (hanya ada 1 orang). Sebelum terpilih menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin, 22 orang anggota DPRD aktif di beberapa organisasi (partai/masyarakat) hal tersebut dapat dilihat dari riwayat organisasi yang dimiliki anggota DPRD.

Kebanyakan anggota DPRD Kota Banjarmasin merupakan orang lama (*incumbent*) dalam dunia legislatif, yaitu sebesar 25 orang atau 55.6 persen. Sebagian besar lainnya, yaitu 20 orang atau sebesar 44.4 persen sama sekali belum pernah menjadi anggota legislatif.